



# POLA KEMITRAAN PARIWISATA DALAM MANAJEMEN ATRAKSI DESA WISATA PAMPANG KOTA SAMARINDA

**Ami Suswandi Putra**

Alumni Magister Kajian Pariwisata  
Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

## **Abstract**

*Pampang Tourism Village or "Desa Wisata Pampang" is the only culture-based tourism in Samarinda. It should be fully supported, but did not show significant progress after 20 years. This research aimed to identify the partnerships pattern of management in Pampang Tourism Village, and formulate improvements that should be implemented. The method used was grounded research with a qualitative approach. The entire research process successively performed with domain analysis, taxonomy, componensial, themes, and triangulation. The results showed that the existing model belonging to the pseudo and subordinate union of partnership. The existing partnership is dominated by the relief fund patterns, Private Investment, CSR, Revolving Loan Fund (KUD), Sub Contracts and General Trade. The Management applied gave insufficient space on human resources development, created gap between tourism and social cultural life of community, limited use of technology and provided a small number of community organization. Therefore improvement plan should be designed on boosting of Private Investment, establishing participation for reformer agents and academics, expanding community involvement, granting savings and loans, and generating KUD as the main of people's activities.*

## **Keywords:**

*Partnership Pattern, Management of Tourism Attraction.*

## **Intisari**

Desa Wisata Pampang merupakan satu-satunya obyek wisata berbasis budaya di Kota Samarinda. Pengelolaannya seharusnya didukung secara penuh, namun tidak terdapat perkembangan signifikan setelah 20 tahun. Penelitian ini mengidentifikasi karakteristik pola kemitraan dalam manajemen atraksi di Desa Wisata Pampang, serta merumuskan perbaikan yang seharusnya diterapkan. Jenis metode yang digunakan adalah *grounded research* dengan pendekatan kualitatif. Analisis yang dilakukan meliputi analisis domain, taksonomi, komponensial, tema, dan triangulasi. Hasil penelitian didapatkan model kemitraan tergolong dalam kemitraan semu dan gabungan subordinatif. Pola kemitraan didominasi pola yang bersifat bantuan, meliputi Bantuan Dana Hibah baik fisik maupun program PNPM Mandiri Pariwisata, Investasi Swasta, CSR, Bantuan Pinjaman Dana Bergulir (KUD), Subkontrak dan Dagang Umum. Manajemen atraksi wisata kurang memberi ruang pengembangan SDM, terlalu membatasi aktivitas pariwisata dengan sosial budaya masyarakat, kurang memanfaatkan teknologi dan minim pengorganisasian komunitas. Oleh sebab itu dirumuskan perbaikan meliputi penggiatan Investasi Swasta, pewardahan agen pembaharu, akademisi, perluasan peran komunitas, pemberian bantuan tabungan dan pinjaman, serta pengaktifan KUD sebagai pemersatu aktivitas.

## **Kata Kunci:**

*Pola Kemitraan, Manajemen Atraksi Wisata.*

## PENGANTAR

Desa Wisata Pampang merupakan satu-satunya obyek wisata budaya di Kota Samarinda. Desa ini terletak  $\pm$  25 km dari pusat kota di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara. Sejak diresmikan tahun 1991, desa ini mendapat bantuan pemerintah dalam pengembangan infrastruktur, operasional atraksi wisata dan promosi. Akan tetapi tidak terdapat beberapa infrastruktur pendukung dasar yang difasilitasi oleh pihak pemerintah. Selain itu, Dana bantuan yang dialokasikan pemerintah kurang efektif, menyebabkan masyarakat kurang mampu mandiri sebagai pengelola. Bahkan hingga kini, kepastian hukum berupa SK Desa Budaya dari pihak pemerintah belum diterbitkan.

Khusus untuk atraksi seni pertunjukan, terdapat upacara adat Pelas Tahun yang diadakan setiap bulan Juni dan pementasan tarian adat setiap hari Minggu. Akan tetapi sebagai obyek wisata budaya, desa ini kurang merepresentasikan kebudayaan asli suku Dayak Kenyah. Marten Abat selaku ketua adat menyatakan bahwa generasi sekarang hanya melihat tarian sebagai ritual. Tradisi menggunakan anting hingga kuping memanjang dan tato sudah mulai ditinggalkan. Dilihat dari sisi hunian, dahulu seluruh masyarakat tinggal di dalam sebuah *lamin* (rumah adat Suku Dayak), sedangkan saat ini masyarakat membangun rumah masing-masing.

Beragam fakta tersebut mengindikasikan bahwa pola/bentuk kerjasama yang diterapkan tidak mendukung keberkelanjutan, tidak inovatif, tidak menyeluruh dan tidak partisipatif. Akan tetapi, pemerintah terkesan tidak serius dalam melakukan pengembangan, sedangkan masyarakat terlalu bergantung pada pemerintah untuk menjalankan aktivitas pariwisata. Fenomena tersebut menyebabkan biasanya peran dan tanggungjawab masing-masing pihak.

Penelitian ini bertujuan: 1) mengidentifikasi karakteristik pola kemitraan dalam manajemen

atraksi di Desa Wisata Pampang; serta 2). Menyusun rumusan pola kemitraan/ kerjasama dengan mitra yang seharusnya diterapkan.

## KERANGKA TEORITIK

Penelitian mengacu konsep desa wisata, yaitu suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan. Suasana tersebut dapat berupa kehidupan sosial ekonomi, budaya, adat istiadat, keseharian masyarakat. Hal tersebut dapat berwujud arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan.

Konsep manajemen dalam atraksi wisata dapat dimaknai sebagai suatu perencanaan pengelolaan sumberdaya alam, budaya dan buatan pada suatu obyek wisata, dilakukan secara menyeluruh dan menekankan upaya pelestarian.

Manajemen sumberdaya manusia memiliki 4 fungsi utama, yaitu: fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Adapun aspek manajemen terkait aktivitas desa wisata budaya memerlukan pengembangan kemampuan individu, ekologi dan lingkungan, teknologi yang sesuai dan komunitas masyarakat. Sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan, maka manajemen memiliki unsur-unsur pokok yang meliputi sumberdaya manusia, pendanaan, metode, peralatan, bahan dan pasar.

Kemitraan sebagai suatu konsep kerjasama memiliki beberapa kriteria, yaitu dilakukan lebih dari satu pihak, memiliki kebutuhan masing-masing, namun sepakat mencapai visi dan tujuan untuk meningkatkan kapasitas. Model kemitraan berdasarkan tingkat kesadaran para pelaku dibedakan menjadi kemitraan semu, mutualistik dan konjugasi. Adapun berdasarkan kesenjangan kedudukan, meliputi model kemitraan gabungan sub-ordinatif, gabungan linear dan kolaborasi linear.

Pola-pola kemitraan merupakan variasi penerapan dalam kerangka model kemitraan. Pola yang diteliti mengacu pada teori pola kemitraan usaha kecil, pemberdayaan masyarakat dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kemitraan usaha kecil terdiri dari: intiplasma, subkontrak, dagang umum, keagenan dan waralaba. Kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat meliputi pola Investasi Publik maupun Swasta. Adapun pola CSR yang ideal mengandung ketiga unsur, yaitu pemberian donasi, pembinaan dan keberlanjutan.

## METODE

Penelitian dilakukan dengan pendekatan metode kualitatif dan jenis penelitian *grounded research*. Data utama adalah ragam aktivitas pelaku, diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi. Pemilihan narasumber dilakukan dengan teknik *purposive* dan *snowball sampling*. Proses pengumpulan data dilakukan bersamaan dengan proses analisis. Data ragam aktivitas diklasifikasikan berdasarkan kemiripan sifatnya, sehingga didapatkan ragam atraksi wisata, pelaku yang berperan serta mekanisme manajemen yang diterapkan.

Ketiga tahap tersebut menjadi bahan untuk dianalisis pada proses evaluasi pola kemitraan secara menyeluruh. Beragam permasalahan yang ditemukan ditinjau kembali untuk menentukan rumusan perbaikan, disesuaikan dengan teori pendukung. Keseluruhan proses penelitian secara berturut-turut dilakukan dengan analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponen-sial, analisis tema, dan analisis triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Pola Kemitraan

Pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat yang terjadi selama ini adalah lebih pada pemberdayaan masyarakat lokal, walaupun terjadi beberapa pergeseran sesuai

dengan aturan perundangan. Jalur koordinasi pemerintah dan masyarakat mengalami beberapa perubahan. Pada tingkat pemerintah, tahun 1991 oleh Dinas Pariwisata Provinsi, 1999 secara bersama oleh Dinas Pariwisata Provinsi dan Kota, 2008 oleh Dinas Pariwisata Kota. Pada tingkat masyarakat, tahun 1991 melalui Perangkat Desa, 1993 melalui KUD dan 1998 melalui Pengurus Kesenian. Hal tersebut secara perlahan menyebabkan intensitas komunikasi menjadi berkurang, sehingga operasionalisasi manajemen atraksi wisata menjadi kurang terkontrol.

**Tabel 1.** Pola Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat

	Pihak	Pemerintah	Masyarakat
		Dinas Pariwisata	Perangkat Desa
Kriteria Kemitraan	Kebutuhan	Menyuguhkan Hiburan Khas Lokal bagi Tamu	Meningkatkan Posisi sebagai warga kota
	Visi	Menciptakan daya Tarik wisata kota yang khas	
	Tujuan	Mempopulerkan budaya Dayak Kenyah	
	Kesepakatan	Terjadi pada forum informal tahun 1991	

Penerapan konsep ini terjadi pada beberapa atraksi, yaitu pada sebagian proses pembangunan Lamin Adat Pemung Tawai, penyelenggaraan Upacara Pelas Tahun dan pemberdayaan pengrajin terkait peningkatan produksi cinderamata.

### Kasus Pembangunan Lamin Adat Pemung Tawai

Pada tahap perencanaan, melalui pertemuan informal tahun 1991 pihak pemerintah memicu masyarakat untuk mulai berfikir tentang penggalan potensi budaya yang dapat dikembangkan sebagai atraksi wisata. Pertemuan tersebut dijawab oleh masyarakat dengan membangun purwarupa *lamin*. Bentuk nyata tersebut lalu

didukung pemerintah dengan membantu pembangunan lanjutan hingga menjadi lebih sempurna.

Pada tahap pengorganisasian, pemeran utama adalah masyarakat lokal yang terwakili melalui Lembaga Adat Desa Wisata Pampang. Memerlukan waktu 3 tahun untuk benar-benar mulai merealisasikan pembangunan purwarupa *lamin* tersebut. Hal ini disebabkan keterbatasan sumberdaya dan minimnya peran pemerintah.

Pada tahap pelaksanaan, pemeran utama tetap didominasi oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena sejak awal masyarakat telah memberikan penegasan bahwa segala bentuk pembangunan harus dilaksanakan sendiri oleh masyarakat itu sendiri. Pihak pemerintah berperan memberikan bantuan dana dan pengawasan pembangunan.

Pada tahap pengendalian, tidak tampak implementasi peran yang ideal. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi kebersihan maupun kerapian *lamin* yang kurang terjaga (Observasi, 2012). Kegiatan perawatan hanya dilakukan menjelang perayaan upacara Pelas Tahun secara masif oleh anggota masyarakat.

Pada tahun 2010, dengan bantuan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata melalui PNPM Mandiri Pariwisata, salah satu kegiatannya adalah perbaikan dan pengadaan fasilitas *lamin*. Pada tahun yang sama juga didapatkan bantuan yang diusulkan oleh Dinas Pariwisata Kota Samarinda dan dibantu oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, untuk pembangunan fisik area *lamin* berupa pembangunan gapura, pagar permanen mengelilingi area *lamin*, taman kecil memanjang, dan perkerasan selokan. Pembangunan tersebut mempertegas fungsi ruang dan sirkulasi *lamin* yang diorientasikan untuk aktivitas pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pembangunannya sudah mulai meninggalkan kearifan lokal, karena semakin membatasi penggunaan *lamin* bagi kepentingan sosial.

Pada sisi lain, *lamin* digunakan untuk tempat penghormatan anggota masyarakat yang meninggal dunia (Observasi, 2012). Pihak

pemerintah dan pengelola sendiri justru menyangkan terjadinya hal tersebut, bahwa aktivitas di luar pariwisata sebaiknya dilakukan di luar area *lamin*. Opini tersebut menunjukkan bahwa pemikiran tentang pariwisata berorientasi pada unsur profesionalitas, sedangkan aktivitas sosial bukanlah bagian dari profesionalitas tersebut. Hal ini membuktikan pola pikir pariwisata yang dipahami baik oleh pihak pengelola maupun pemerintah, justru dapat menjauhkan masyarakat lokal dari identitas budayanya.

### **Kasus Penyelenggaraan Upacara Pelas Tahun**

Pada awalnya, Upacara Pelas Tahun merupakan pesta rakyat yang diselenggarakan pada saat panen. Upacara ini mulai dibuka untuk umum sejak tahun 1999 sebagai atraksi wisata.

Pada tahap perencanaan, peran utama dilakukan oleh masyarakat. Mulai dari pencetus ide awal, penyusunan konsep, hingga pembuatan proposal kegiatan. Adapun peran pihak pemerintah hanya sebatas menerima dan merevisi proposal kegiatan dengan menyesuaikan kondisi aktual yang terjadi.

Pada tahap pengorganisasian, terdapat perbedaan pada setiap penyelenggaraan, namun peran utama tetap dilakukan oleh pihak masyarakat. Peran terbesar pemerintah adalah ketika pemberian bantuan bukan berupa dana melainkan barang kebutuhan sebagaimana yang disetujui pada proposal.

Pada tahap pelaksanaan, peran utama tetap dilakukan oleh masyarakat, sedangkan pihak pemerintah cenderung membatasi peran pada segala sesuatu yang berhubungan dengan tokoh-tokoh tamu kehormatan. Jika dipandang dari sisi pariwisata berbasis budaya, hal tersebut dapat menjadi permasalahan. Kesan yang muncul setelah acara berlangsung adalah kegiatan tersebut diselenggarakan untuk pejabat pemerintah dan tamu undangan, bukan lagi sebagai pesta rakyat.

Pada tahap pengendalian, peran utama tetap dilakukan oleh masyarakat. Setiap menjelang

penyelenggaraan, selalu masyarakat yang berinisiatif untuk memulai. Pihak pemerintah yang mengaku menjadikan Upacara Pelas Tahun sebagai agenda rutin tahunan, tetap tidak menyiapkan anggaran khusus.

**Kasus Pengembangan Cenderamata**

Perkembangan kemitraan produksi cinderamata dapat dikelompokkan dalam dua era, yaitu era Koperasi Unit Desa (KUD) dan era PNPM Mandiri Pariwisata. Kondisi KUD saat ini sudah tidak lagi diakui oleh pemerintah karena tidak adanya aktivitas. Adapun Era PNPM Mandiri terjadi pada tahun 2010 dan 2011 Bantuan tersebut bersumber dari anggaran negara yang disalurkan kepada masyarakat melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Pada tahun 2012 bantuan sejenis tidak lagi diterima oleh masyarakat.

Pada tahap perencanaan, dominasi peran dilakukan oleh pihak pemerintah. Hal ini terjadi karena pada dasarnya kedua era tersebut merupakan implementasi dari program pemerintah, sehingga masyarakat hanya berperan sebagai obyek program.

Pada tahap pengorganisasian, peran terbesar dilakukan oleh pihak masyarakat. Mulai dari penentuan pengurus hingga pelaksanaan rapat-rapat dan pertemuan anggota. Pemerintah hanya berperan sebagai pemberi sosialisasi awal. Pada proses ini terjadi ketimpangan manajemen, karena masyarakat kurang mendapat bimbingan. Fungsi kontrol tersebut seharusnya meliputi pendampingan dan audit di akhir pelaksanaan, namun fungsi tersebut tidak terlaksana dengan baik.

Pada tahap pelaksanaan, dominasi peran tetap dilakukan oleh pihak masyarakat. Peran KUD terhadap usaha kecil cinderamata dibatasi pada penyediaan bahan baku yang lebih murah dan pinjaman modal usaha dengan sistem simpan pinjam. Adapun peran PNPM Mandiri adalah memberikan stimulus berupa bantuan tunai bagi para pengrajin cinderamata untuk dapat meningkatkan hasil produksinya.

Pada tahap pengendalian, tidak terdapat usaha yang berarti dari pihak manapun. Hal ini dibuktikan dengan gagalnya pengorganisasian KUD maupun tidak dilakukannya evaluasi berupa audit penggunaan dana PNPM Mandiri secara ketat. Hal ini terjadi karena minimnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Permasalahan yang kemudian muncul disebabkan oleh kurangnya pemahaman konsep terhadap makna bantuan pemerintah. Penyaluran tersebut memang sampai kepada masyarakat, namun manajemen yang terlalu berasas kekeluargaan kemudian membiaskan prinsip keadilan menjadi lebih berwujud pemerataan. Pada laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh masyarakat dan fasilitator terdapat beragam cacatan administrasi, bahkan temuan di lapangan menunjukkan beragam permasalahan substansial. Hal ini terjadi karena pariwisata bukanlah pekerjaan utama masyarakat serta fungsi kontrol pemerintah yang kurang efektif, sehingga semangat mengembangkan pariwisata dari sisi masyarakat mulai menurun (Observasi, 2012).

**Tabel 2.** Pola Kemitraan antara Pihak Pemerintah, Swasta dan Masyarakat (Pembangunan Galeri Cenderamata)

	Pemerintah	Swasta	Masyarakat
Pihak	Dinas Pariwisata Kota	Bank Mandiri	Pengurus Kesenian
Kebutuhan	Memperbaiki fungsi ruang Lamin Adat	Meningkatkan Citra Perusahaan	Menambah Stan Penjualan
Visi	Bersepakatan untuk meningkatkan daya tarik wisata		
Tujuan	Bersepakatan untuk membuka peluang usaha yang lebih luas		
Kesepakatan	Terjadi pada kunjungan lokasi tahun 2008		

Pihak pemerintah melalui Dinas Pariwisata Kota Samarinda dan masyarakat yang diwakili oleh Pengurus Kesenian, pada dasarnya merupakan satu pihak yang sama yaitu organisasi Pengelola Desa Wisata Pampang. Adapun Bank Mandiri berperan sebagai donatur

kegiatan. Interaksi terjadi ketika kunjungan pemerintah dan perwakilan Bank Mandiri ke desa Pampang di tahun 2008, disambut oleh pengurus kesenian guna membahas rencana pembangunan galeri cinderamata.

Pada tahap perencanaan, peran terbesar dilakukan oleh pihak pemerintah. Mulai dari pencetusan ide awal, pewacanaan kepada masyarakat hingga pembuatan proposal kegiatan kepada pihak Bank Mandiri. Sebagai penanggungjawab, dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, pihak pemerintah menjalankan perannya secara baik. Akan tetapi, ide pembangunan tersebut tidak disosialisasikan sejak awal, sehingga masyarakat hanya diposisikan sebagai obyek program.

Pada tahap pengorganisasian, bersama-sama pemerintah dan masyarakat berperan secara seimbang. Melalui forum antara perwakilan Dinas Pariwisata Kota Samarinda dan Pengurus Kesenian yang diadakan secara intensif, segala bentuk keputusan terkait pembangunan disepakati bersama. Mulai dari penentuan lokasi, desain bangunan, ukuran bangunan, hingga sumber bahan baku yang digunakan.

Pada tahap pelaksanaan, peran besar dilakukan oleh masyarakat. Sejak awal pihak masyarakat sudah menentukan sikap untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dengan tenaga sendiri. Pihak pemerintah berperan dalam pengawasan kegiatan, sedangkan pihak Bank Mandiri sebagai donatur menjalankan perannya sesuai rencana. Proses pembangunan tidak menggunakan jasa kontraktor, melainkan memanfaatkan sumberdaya masyarakat, termasuk warga tetangga bersuku lain. Hal ini menunjukkan kekuatan posisi masyarakat sebagai pelaksana kegiatan. Pihak pemerintah maupun Bank Mandiri menghargai sikap dan usaha tersebut.

Pada tahap pengendalian, tidak tampak peran yang berarti diantara semua pihak. Hal ini terjadi karena secara fisik bangunan, kurang mendukung target sasaran yang diharapkan. Penyebabnya adalah faktor kemudahan akses dan kenyamanan. Pondok tersebut terletak di tepi halaman parkir sehingga menambah jarak bagi wisatawan untuk mencapainya, dan bagi masyarakat untuk saling berkomunikasi. Desain bangunan memanjang dan terbuka (tanpa dinding), kurang memperhatikan arah sinar matahari dan kurang pohon peneduh, sehingga pada siang hari terasa panas dan mengurangi kenyamanan. Saat ini sebagian bangunan pondok beralih fungsi menjadi tempat penjualan makanan dan minuman siap saji dan sebagian lagi terbengkalai (Observasi, 2012). Hal ini menunjukkan kurang matangnya perencanaan yang dilakukan, karena tidak melibatkan masyarakat khususnya penjual cinderamata.

### **Pola Kemitraan antara Pihak Swasta dan Masyarakat**

Pola kemitraan antara pihak swasta dan masyarakat mulai diterapkan sejak pergantian Kepala Adat dan Pengurus Kesenian setelah tahun 2000. Melalui Lembaga Adat Desa diputuskan untuk bernegosiasi dengan perusahaan swasta agar turut berkontribusi terhadap pariwisata di Desa Wisata Pampang. Jalur yang tempuh adalah melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang disediakan oleh setiap perusahaan. Adapun pihak swasta yang berperan adalah PT. VICO untuk kegiatan renovasi serambi Lamin Adat Pemung Tawai, PT. Lana Harita untuk kegiatan operasional Pengurus Kesenian dan PT. TOTAL untuk kegiatan pelatihan.

## Kasus Renovasi Serambi Lamin Adat Pemung Tawa

Tabel 3. Pola Kemitraan antara Pihak Swasta dan Masyarakat

Kriteria Kemitraan		Swasta	Masyarakat
	Pihak	PT. VICO	Utusan Lembaga Adat
	Kebutuhan	Meningkatkan Citra Perusahaan	Meningkatkan Kualitas Lamin Adat Pamung Tawai
	Visi	Bersepakat untuk meningkatkan daya tarik wisata	
	Tujuan	Bersepakat untuk merenovasi serambi Lamin Adat Pamung Tawai	
	Kesepakatan	Terjadi pada penyetujuan proposal tahun 2004	

Pada awal pendiriannya, *lamin* hanya berfungsi sebagai sarana pariwisata. Pada tahun 2004 dengan bantuan dari PT. VICO, dilaksanakan renovasi serambi *lamin* sehingga menjadi lebih layak bagi acara pertunjukan kesenian adat. Sejak saat itulah eksistensi *lamin* sebagai atraksi wisata mulai disadari.

Pada tahap perencanaan, dominasi peran dilakukan oleh masyarakat. Mulai dari pembahasan perlunya merenovasi serambi, hingga pembuatan proposal kegiatan. Hal ini berarti kesadaran muncul dari pihak masyarakat, sedangkan pihak PT. VICO hanya menerima dan menyetujui proposal yang diajukan dengan berbagai penyesuaian. Salah satu penyesuaian yang dimaksud adalah pencatuman nama perusahaan pada setiap titik yang memungkinkan.

Pada tahap pengorganisasian, dominasi peran tetap dilakukan oleh masyarakat. Pihak PT. VICO sempat mengusulkan untuk turut serta dalam proses pembangunan, tetapi pihak masyarakat hanya menyetujui untuk diawasi. Hal ini bertujuan untuk memberi jaminan bahwa kegiatan tersebut benar-benar terlaksana dan membatasi intervensi eksternal atas kegiatan internal.

Pada tahap pelaksanaan, dominasi peran tetap dilakukan oleh pihak masyarakat. Beragam kreatifitas masyarakat teraplikasikan dalam upaya menghiasi serambi *lamin*. Adapun

PT.VICO berperan sebagai donatur dan pengawas kegiatan. Sebagaimana permintaan yang diinginkan perusahaan, nama PT. VICO tampak terukir pada beberapa benda (Observasi, 2012).

Pada tahap pengendalian, peran utama tetap dilakukan oleh masyarakat. Hal ini meliputi pemeliharaan benda-benda yang telah dibuat, serta mempertahankan warna (Observasi, 2012). Akan tetapi tidak terdapat penambahan setelah kegiatan tersebut berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan yang terjalin tidak berkelanjutan.

## Kasus Penyelenggaraan Seni Pertunjukan

Hubungan kemitraan antara masyarakat dan pihak swasta dalam hal seni pertunjukan dilakukan oleh dua perusahaan, yaitu PT. Lana Harita dan PT.TOTAL. PT.Lana Harita memberi bantuan langsung dana operasional sebesar Rp. 1.000.000,- /bulan. PT. TOTAL mengadakan pelatihan untuk meningkatkan mutu pertunjukan.

Tabel 4. Pola Kemitraan antara PT. Lana Harita - Masyarakat

Kriteria Kemitraan		Swasta	Masyarakat
	Pihak	PT. Lana Harita	Pengurus Kesenian
	Kebutuhan	Meningkatkan citra perusahaan	Mempertahankan semangat kerja
	Visi	Bersepakat untuk mempertahankan aktifitas wisata	
	Tujuan	Bersepakat untuk menjaga rutinitas seni pertunjukan	
	Kesepakatan	Terjadi pada penyetujuan proposal tahun 2005	

Oleh Pengurus Kesenian, bantuan tersebut diutamakan untuk pembayaran rekening listrik dan air. Sisa dana kemudian digabungkan dengan akumulasi tiket pertunjukan untuk

dibagikan kepada anggota masyarakat aktif pada bulan tersebut. Terdapat sistem pendataan kehadiran secara terbuka. Permasalahannya terletak pada pengelolaan keuangan yang tidak profesional, karena seluruh penghasilan akan habis dibagikan secara merata pada masyarakat yang turut berpartisipasi, dengan proporsi tertentu. Oleh sebab itu pihak pengurus tidak memiliki dana kas dalam upaya investasi yang mandiri. Itulah sebabnya pihak pengurus menjadi terlalu bergantung pada datangnya bantuan. Hal ini menyebabkan pengembangan pariwisata di Desa Wisata Pampang berjalan sangat lambat.

**Tabel 5.** Pola Kemitraan PT. TOTAL - Masyarakat

Kriteria Kemitraan		Swasta	Masyarakat
	Pihak	PT. TOTAL	Pengurus Kesenian
	Kebutuhan	Meningkatkan citra perusahaan	Meningkatkan kualitas Pertunjukan
	Visi	Bersepakat meningkatkan sumberdaya manusia pariwisata	
	Tujuan	Bersepakat untuk memberi pelatihan seni pertunjukan	
	Kesepakatan	Terjadi pada penyetujuan proposal tahun 2007	

Pada tahap perencanaan, dominasi peran dilakukan oleh masyarakat. Sebagaimana pula dilakukan terhadap perusahaan yang lain, masyarakat berinisiatif lebih dulu untuk mengajukan proposal agar mendapatkan dukungan atas aktivitas pariwisata di Desa Wisata Pampang.

Pada tahap pengorganisasian atas kegiatan pelatihan, peran terbesar adalah dari pihak PT. TOTAL, karena masyarakat merupakan pihak yang dilatih, sehingga hanya menunggu pelaksanaan kegiatan tersebut dan membuka kesediaan untuk mau belajar.

Pada tahap pelaksanaan, dominasi peran tetap dilakukan oleh PT. TOTAL selaku pelaksana. Pada pelaksanaannya, pihak yang melatih bukanlah dari internal perusahaan, melainkan pihak lain yang memiliki kemampuan

husus dalam bidang pelatihan dan peningkatan SDM terkait aktivitas seni pertunjukan.

Pada tahap pengendalian, dalam hal ini meliputi segala bentuk usaha proses pendampingan yang intensif, untuk memastikan pelatihan yang dilakukan membawa pengaruh positif bagi penyelenggaraan acara pementasan tari. Akan tetapi tidak ada upaya dari pihak PT. TOTAL terkait hal tersebut. Masyarakat seolah diberi kepercayaan penuh untuk dapat berkembang dengan sendirinya. Hal ini berpotensi menyebabkan kurang terkontrolnya perubahan positif yang dapat terjadi setelah pelatihan tersebut diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa proposal yang berujung kesepakatan pada tahun 2007 ternyata masih kurang efektif, karena tidak ada evaluasi dari pihak PT. TOTAL sebagai pelaksana kegiatan.

**Tabel 6.** Pola Kemitraan Antar Masyarakat Pada Kasus Pengadaan Cenderamata

Kriteria Kemitraan		Masyarakat	Masyarakat
	Pihak	Pengusaha Galery	Pengrajin
	Kebutuhan	Memenuhi permintaan konsumen	Menambah peluang usaha
	Visi	Ingin memperoleh keuntungan	
	Tujuan	Bersepakat untuk memasarkan produk cenderamata	
	Kesepakatan	Setiap kali terjadi transaksi	

Pihak pengusaha galeri dan pengrajin adalah dua pihak yang berbeda secara profesi, meskipun keduanya adalah warga Desa Wisata Pampang. Interaksi terjadi ketika transaksi, dengan kesepakatan tak tertulis namun dipegang teguh.

Jika terdapat pesanan yang melebihi kapasitas pengrajin binaannya, maka pengusaha galeri akan mencari barang tersebut kepada pengrajin yang lain, menggunakan pola transaksi jual beli dengan harga yang ditentukan oleh pengrajin. Pola semacam ini menyerupai pola kemitraan Dagang Umum.

Pada beberapa kondisi, terdapat kemungkinan pengusaha galeri membutuhkan jasa

pengrajin lain untuk ikut memproduksi barang pesannya. Pada kasus ini, bahan baku disediakan pengusaha galeri, sehingga pengrajin hanya menyediakan jasa pembuatan pesanan. Pola semacam ini menyerupai pola kemitraan Subkontrak.

Adapun pada beberapa jenis barang yang tidak mampu diproduksi oleh pengrajin, maka akan dibeli pada grosir yang menyediakan barang-barang tersebut. Citra Niaga di pusat Kota Samarinda merupakan salah satu grosir yang dimaksud. Hal ini menunjukkan lemahnya pengelolaan sumberdaya yang ada di Desa Pampang, karena penyediaan bahan baku saja tidak mampu diakomodir secara mandiri.

### **Evaluasi Terhadap Pola Kemitraan**

Berdasarkan model kemitraan, secara umum dapat digolongkan ke dalam kemitraan semu dan kemitraan gabungan subordinatif. Kemitraan semu ditunjukkan dengan kurangnya pemahaman pelaku terhadap substansi kemitraan itu sendiri. Para pelaku terfokus pada segala sesuatu yang tampak (fisik), sekedar melaksanakan kewajiban, kurang pendekatan komunikasi yang efektif serta kurang berfikir jangka panjang. Adapun penggolongan kemitraan gabungan subordinatif karena pemerintah lebih dominan pada aktivitas manajerial dan masyarakat pada aktivitas operasional.

Pola kemitraan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dapat digolongkan dalam dua pola utama, yaitu Dana Hibah dan Pinjaman Bergulir. Dana Hibah terbagi dua jenis, yaitu bantuan dana untuk kelompok masyarakat dan pembangunan fisik.

Kemitraan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat telah mengalami pergeseran kepentingan. Pada awalnya pemerintah memiliki kebutuhan untuk menyuguhkan hiburan khas lokal bagi tamu, namun saat ini justru enggan mendampingi tamu untuk berkunjung. Pada awalnya masyarakat berkepentingan meningkatkan posisi sebagai warga kota, namun saat ini posisi yang diinginkan kurang tercapai,

melainkan justru kebutuhan ekonomi yang lebih mendominasi. Visi secara umum dapat dikatakan tercapai, karena daya tarik wisata di Desa Wisata Pampang sudah populer di luar daerah, akan tetapi tidak untuk wisatawan lokal.

Pola Investasi Swasta dan CSR pada dasarnya serupa, perbedaan hanya terdapat pada kontribusi pemerintah. Dikatakan Pola Investasi Swasta karena pemerintah mengajak pihak swasta untuk memberi donasi, sedangkan CSR dilakukan tanpa campur tangan pemerintah. Peran swasta dapat dikatakan sangat besar terhadap perkembangan pariwisata. Akan tetapi kurangnya fungsi pengendalian yang profesional atraksinya menyebabkan bantuan tersebut kurang optimal.

Pada penerapan pola CSR, tidak ditemukan aplikasi CSR murni, melainkan sebatas donasi fisik, donasi berkelanjutan, dan donasi pembinaan. Hal ini berarti tidak terdapat penerapan pola CSR secara utuh yakni berupa donasi untuk pembinaan yang berkelanjutan.

Pola Subkontrak dan Dagang Umum merupakan pola yang berkembang dalam 10 tahun terakhir. Hal ini karena bangkrutnya KUD menyebabkan beberapa anggota masyarakat harus mampu lebih mandiri, sehingga berdiri galeri-galeri cinderamata yang bersumber dari modal pribadi. Keberadaan galeri tersebut sangat mendukung aktivitas kerajinan tangan, karena mampu menjaring wisatawan secara efektif. Akan tetapi pola yang terbentuk kemudian lebih mengarah pada bisnis yang profesional, penuh perhitungan dan kurang semangat kekeluargaan.

### **Rumusan Perbaikan Pola Kemitraan**

Interaksi Pemerintah – Swasta -Masyarakat, dengan pihak swasta sebagai donatur, pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaksana, dapat menghasilkan luaran yang efektif. Akan tetapi perlu ditekankan pentingnya perencanaan yang matang dan partisipatif agar hasilnya benar-benar tepat sasaran.

Peningkatan kelembagaan lokal dapat membantu Pengurus Kesenian. Hal ini mengacu pentingnya *multi-layer* kemitraan, dalam arti kemitraan yang diterapkan dapat pula mewadahi anggota-anggota masyarakat yang memiliki potensi untuk bermitra dan semakin mendukung aktivitas pariwisata.

Mengadopsi program PNPM Mandiri, keberadaan fungsi fasilitator dapat menetralkan konflik kepentingan internal, namun sebaiknya individu yang terpilih bukan dari anggota masyarakat maupun pihak pemerintah.

Meningkatkan kunjungan wisatawan dengan promosi ke lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan untuk penyempurnaan penerapan teori sumberdaya dalam manajemen (6M), yang pada unsur *market* (pasar/pemasaran) masih kurang mendapat perhatian. Hal ini juga dalam upaya menerapkan kembali filosofi awal konsep desa wisata yang bertujuan memberikan layanan wisata sambil mengenal, merasakan dan bahkan melakoni kehidupan dan budaya masyarakat.

Membuka sanggar tari bagi umum, untuk memacu semangat pelestarian budaya bagi kalangan pemuda. Hal ini juga merupakan usulan dari beberapa anggota masyarakat selama proses penelitian.

Mengadopsi program Takesra dan Kukesra, yaitu memberi pinjaman berupa tabungan kepada masing-masing keluarga. Hal ini merupakan satu upaya untuk menciptakan transparansi dan profesionalitas, yang merupakan bagian dari kunci sukses kemitraan. Hal ini bertujuan untuk menambah peran pihak swasta agar lebih berkontribusi, meredam pola konsumtif dan memacu semangat bersaing antar anggota masyarakat.

Mengembalikan fungsi KUD sebagai pemersatu aktivitas masyarakat. Akan tetapi perlu ditekankan fungsi KUD dibatasi pada penyediaan bahan baku untuk memberi kemudahan terutama bagi pengrajin kecil. Secara sederhana, KUD difungsikan khusus untuk mengkoordinir produksi cinderamata. Selain itu dapat pula dikembangkan aktivitas lain untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

**Tabel 7.** Matriks Gabungan Analisis Pola Kemitraan

Model Kemitraan	Pola Kemitraan	Jenis Atraksi	Usulan Pola Kemitraan	Pertimbangan
Kemitraan Gabungan Subordinatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi Publik</li> <li>Bantuan Dana Hibah Fisik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan lamin</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi Publik</li> <li>Bantuan dana Hibah Operasional Kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan Pelas tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Khusus Upacara Pelas Tahun, sebaiknya dapat mewadahi komunitas luas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan komunitas-komunitas seni di KalTim untuk turut memeriahkan penyelenggaraan acara</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi Publik</li> <li>Pinjaman Bergulir (KUD)</li> <li>Bantuan dana hibah modal (PNPM Mandiri Pariwisata)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan cinderamata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengaktifkan KUD sebatas penyediaan bahan baku</li> <li>Mengadopsi program Takesra - Kukesra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembalikan fungsi KUD sebagai pemersatu aktifitas masyarakat</li> <li>Memberi pinjaman berupa tabungan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi Swasta berupa pembangunan fisik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan galeri cinderamata</li> </ul>		

Kemitraan Kolaborasi Linier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CSR Donasi berupa pembangunan dan pengadaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renovasi serambi Lamin</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CSR Donasi berkelanjutan berupa bantuan bulanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan seni pertunjukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggiatkan pola investasi swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interaksi Pemerintah – Swasta – Masyarakat, lebih efektif dan efisien.</li> </ul>
Kemitraan Gabungan Linier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CSR Donasi Pembinaan berupa pengadaan pelatihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan seni pertunjukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewadahi peran agen pembaharu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kelembagaan local dapat membantu peran Pengurus Kesenian</li> <li>• Mengadopsio program PNPM, fasilitator dapat menetralsir konflik internal.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuka peluang kalangan akademisi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kunjungan wisatawan dengan promosi ke lembaga pendidikan</li> <li>• Membuka sangara tari bagi umum</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subkontrak</li> <li>• Dagang Umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Cinderamata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertahankan pola Subkentrak dan Dagang Umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertahankan jiwa bersaing dan profesionalitas</li> </ul>

## KESIMPULAN

Berdasarkan karakter kemitraan, diketahui pola yang diterapkan meliputi Investasi Publik berupa Bantuan Dana Hibah baik fisik maupun permodalan, Bantuan Pinjaman Dana bergulir (KUD), Investasi Swasta, CSR, Subkontrak dan Dagang Umum. Adapun pola yang tidak ditemui di lapangan adalah pola Inti Plasma, Waralaba dan Keagenan.

Berdasarkan aspek manajemen, secara umum manajemen atraksi di Desa Wisata Pampang kurang memberi ruang pada pengembangan sumberdaya manusia, memberi pemisahan antara pariwisata dan sosial budaya masyarakat, keterbatasan pemanfaatan teknologi dan minimnya pengorganisasian komunitas masyarakat.

Pola kemitraan yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki operasionalisasi kemitraan di masa yang akan datang, yaitu meliputi

penggiatan Investasi Swasta, pewardahan agen pembaharu, pewardahan kalangan akademisi, perluasan peran komunitas pada penyelenggaraan Upacara Pelas Tahun, pemberian bantuan dan pinjaman berupa tabungan, serta pengaktifan KUD sebagai pemersatu aktivitas. Secara umum rumusan tersebut berfungsi meminimalisir pengelolaan dana cair secara bebas oleh masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan dana bantuan. Bantuan bersifat hibah dibatasi pada pengadaan pelatihan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota masyarakat. Keperluan permodalan maupun stimulus produktivitas dapat diakomodir dengan pola bantuan tabungan untuk menyeleksi individu-individu yang benar-benar serius mengembangkan usaha pariwisatanya. Pada sisi lain, perlu peningkatan pelaku dalam manajemen atraksi agar tercipta semangat pariwisata yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bose, D.C., 2006, *Principles of Management and Administration*, Delhi: Prentice-Hall.
- Charoenwongsa, P., 1999, *Tourism and Cultural Heritage in Southeast Asia: Heritage Resource Management in Tourism*, Bangkok: Amarin Co. Ltd.
- Damanik, J. dan Weber, H.F., 2006, *Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Provinsi Kalimantan Timur, 2004, *Inventarisasi Obyek Wisata Budaya Kalimantan Timur*, Samarinda: Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Provinsi Kalimantan Timur.
- DPRD Provinsi Kalimantan Timur, 2011, *Masyarakat Pampang Tuntut SK Desa Budaya*, <<http://www.dprd-kaltimprov.go.id/berita/-masyarakat-pampang-tuntut-skdesa-budaya.html>> (diakses 26 September 2011).
- Frans, S.A., 2010, *Perhatian Pemerintah Kota Samarinda Terhadap Sektor Pariwisata dan Budaya Amat Diragukan*, <<http://pampangsuniaso.wordpress.com/2010/03/06/>> (diakses 2 Juli 2011).
- Hasibuan, M.S.P., 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Jonker, J., Pennink, B.J.W., Wahyuni, S., 2011, *Metodologi Penelitian: Panduan untuk Master dan Ph.D. di Bidang Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat.
- Media Indonesia., 2008, *Saat Tradisi Tinggal Seremoni*, [http://www.mediaindonesia.com/data/pdf/pagi/2008-07/2008-07-15\\_05.pdf](http://www.mediaindonesia.com/data/pdf/pagi/2008-07/2008-07-15_05.pdf) (diakses 26 September 2011).
- Prastowo, 2011, *Memahami Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Priyasukmana, S. dan Mulyadin R.M., 2001, "Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan UU Otonomi Daerah", *Info Sosial Ekonomi*, 2(1), hal. 37-44.
- Putra. A. S., 2010, *Penataan DAS Karang Mumus Sebagai Kawasan Wisata Budaya Kalimantan Timur*, Skripsi: Universitas Brawijaya.
- Rachima, S.M., Sudharnoto, D. dan Sadana A.S., 2006, "Mengenal Arsitektur Rakyat dari Perubahan Bentuk Lamin Masyarakat Dayak di Desa Wisata Pampang-Samarinda", *Arsitektur Vernakular*, 3(1), hal. 1-9.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, A.T., 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media.
- Taman Budaya Kalimantan Timur, 1976, *Inventarisasi Kebudayaan Kalimantan Timur*, Samarinda: P.T. Alum Taman Budaya Kalimantan Timur.
- Terry, G.R., 1977, *Principles of Management*, Madison: R. D. Irwin Inc.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. 6th Round Table Discussion, Financial Club Jakarta, 2008, *Menggagas Standar Audit*
- Program CSR: Implementasi UU Perseroan Terbatas, Suharto, E., Bandung: Asosiasi Auditor Internal (AAI).